

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

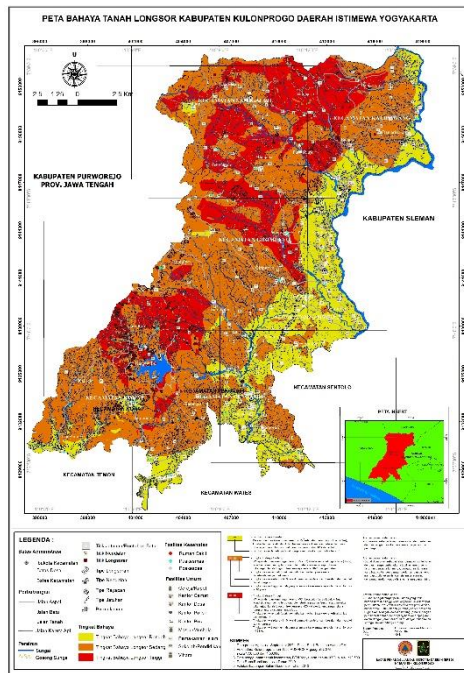
Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis, dengan dua musim: panas dan hujan, serta ditandai dengan cuaca, suhu, dan arah angin yang sangat bervariasi. Kondisi iklim tersebut, dipadukan dengan topografi permukaan serta kondisi fisik dan kimia batuan yang relatif berbeda, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Di sisi lain, kondisi ini dapat menimbulkan beberapa akibat yang mengerikan bagi manusia, seperti bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan cenderung semakin parah sehingga meningkatkan jumlah dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan) di banyak wilayah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja, tanah longsor dan banjir bandang terjadi di Jember, Banjarnegara, Manado, Terengalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia direncanakan dan dirancang untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, proses pembangunan tetap saja merusak lingkungan dan ekosistem. Akibat eksploitasi yang sebelumnya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar), sumber daya tersebut telah kehilangan kelayakannya bagi kehidupan manusia. Sumber daya hutan Indonesia semakin berkurang dari tahun ke tahun, dan eksploitasi sumber daya mineral menyebabkan kerusakan fisik pada ekosistem, yang sering kali menyebabkan peningkatan risiko bencana. (Rahman, 2015).

Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang di

sebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia (Fatiatun et al., 2019). Bencana tidak terjadi begitu saja namun ada faktor kesalahan dan kelalaian manusia dalam mengantisipasi alam dan kemungkinan bencana yang dapat menyimpannya. Tanah longsor merupakan bencana merupakan bencana yang terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan terjadi lebih dari satu hari. Struktur tanah labil yang tidak merata sangat rawan terjadinya tanah longsor. Pada umumnya tanah longsor ini terjadi di daerah dataran tinggi serta daerah pegunungan. Masyarakat yang tinggal di lereng gunung merupakan kelompok rentan untuk resiko terjadinya tanah longsor. Tanah longsor juga dapat dipicu oleh getaran gempa bumi hingga merontokan struktur tanah.

Permasalahan tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo sudah menjadi permasalahan yang khas. Upaya pengendalian longsor dilakukan secara komprehensif baik dari aspek structural maupun non struktural. Kita diingatkan bahwa permasalahan tanah longsor merupakan penghambat kesejahteraan sosial dan kemajuan masyarakat. Terdapat kekhawatiran yang meluas di kalangan warga Kulon Progo, terutama yang tinggal di daerah dataran tinggi, bahwa bencana tersebut dapat mengancam nyawa. Oleh karena itu, bencana tanah longsor ini menjadi misi bersama khususnya Pemerintah Kulon Progo dan dilaksanakan langsung oleh BPBD Kulon Progo.

Gambar 1. 1 Peta Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo



Sumber: BPBD Kulon Progo

Dari gambar di atas dapat di simpulkan bahwa daerah rawan bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo masih besar. Daerah yang berwarna merah merupakan daerah dengan tingkat bahaya tinggi. Daerah ini meliputi kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, pengasih, dan nanggulan. Kecamatan yang paling rentang Tanah Longsor yaitu kecamatan Kokap dan Girimulyo karena kecamatan ini di dominasi dengan wilayah kemiringan lereng $>30^{\circ}$, ketebalan tanah lapuk $<4m$, kondisi batuan sering terpotong oleh struktur patahan/sesar ataupun kekar. Daerah yang memiliki warna oren memiliki tingkat bahaya sedang. Daerah ini dengan wilayah kemiringan lereng $15^{\circ}-30^{\circ}$, ketebalan tanah lapuk tipis ($<2m$), kondisi batuan sering terpotong oleh patahan/sesar ataupun kekar. Daerah yang berwarna kuning memiliki wilayah dengan kemiringan lereng $<15^{\circ}$, ketebalan tanah lapuk tipis ($\geq 2m$), kondisi batuan relative stabil dan belum banyak di temukan indikasi longsoran.

Tabel 1. 1 Data kejadian tanah longsor di Kulon Progo tahun 2022

| No | Kapanewon | Jumlah |
|----|-----------|--------|
|----|-----------|--------|

| | | |
|-------|------------|-----|
| 1 | Temon | 10 |
| 2 | Wates | 8 |
| 3 | Panjatan | 0 |
| 4 | Galur | 0 |
| 5 | Lendah | 1 |
| 6 | Sentolo | 4 |
| 7 | Pengasih | 23 |
| 8 | Kokap | 229 |
| 9 | Nanggulan | 5 |
| 10 | Girimulyo | 103 |
| 11 | Samigaluh | 115 |
| 12 | Kalibawang | 124 |
| Total | | 622 |

Sumber: BPBD Kulon Progo

Berdasarkan table di atas Kecamatan yang paling tinggi tingkat kejadian berada di Kecamatan Kokap dengan 229 kejadian. Hal ini dikarenakan kokap adalah daerah yang paling rawan terjadi tanah longsor di banding daerah lainnya. Kemudian disusul kecamatan Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang dengan kejadian hamper sama di kisaran <100 kejadian. Untuk daerah kecamatan Temon, Wates, Lendah, Sentolo, pengasih, dan Nanggulan memiliki rentang kejadian >25 kejadian tanah longsor. Sedangkan di kecamatan Galur dan Panjatan tidak ada kejadian Tanah Longsor, hal ini di karenakan Sebagian besar letak geografis dari 2 kecamatan ini berada di pesisir pantai sehingga potensi Tanah Longsor sangat kecil. Tentunya permasalahan ini memerlukan perhatian agar kedepannya masalah ini bisa di atasi, karena jika masalah ini tidak di tanggapi dengan serius maka akan terus merugikan baik masyarakat maupun pemerintah.

Selama ini Ketika terjadi bencana tanah longsor di kulon progo pemerintah belum mampu memberikan pelayanan kepada semua daerah yang terdampak. Setiap daerah yang terdampak masih melakukukan penanggulangan secara mandiri dengan bergotong royong dengan masyarakat. Dengan kejadian seperti itu penanggulangan tanah longsor tidak akan maksimal. Secara pendataan masyarakat yang terdampak akan

menimbulkan perselisian dalam melakukan penanganan. Dalam menanggapi hal ini tentunya tidak bisa di selesaikan oleh satu pihak saja. Permasalahan ini perlu adanya suatu koordinasi antar Lembaga sehingga dapat mempermudah dan mempercepat penyelesaian masalah tanah longsor di Kulon Progo. Maka dari itu harus adanya koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, BPBD, serta pihak Masyarakat Kulon (Setiawan et al., 2021).

Paradigma penanggulangan bencana berkembang lagi dengan mulai mempertimbangkan dinamika faktor-faktor kerentanan di dalam masyarakat yang disebut dengan paradigma pembangunan. Upaya-upaya yang dilakukan lebih bersifat mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana dengan program perencanaan pembangunan. Penguatan ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan merupakan program serta upaya yang telah dilakukan pemerintah. Paradigma yang terakhir adalah paradigma pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian kepada faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik dalam perencanaan penanggulangan bencana. Dalam paradigma ini perencanaan penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan segenap pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana (BPBD Kulon Progo, 2022).

Mandat undang-undang No. 24 Tahun 2007 khususnya pasal 21 menyebutkan bahwa salah satu tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. Dengan kata lain UU No. 24 Tahun 2007 tersebut mengharuskan setiap pemerintah daerah memiliki dokumen kajian risiko bencana sebagai dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi untuk pengurangan risiko bencana. Salah satu aspek penting dalam kajian risiko bencana adalah menentukan lokasi-lokasi yang

memiliki risiko bencana tinggi yang dituangkan ke dalam peta risiko bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang wilayah.

Secara epistemologis kata kolaborasi berasal dari bahasa Inggris *co-labor* yang berarti kerja sama. Pada abad ke-19, seiring berkembangnya industrialisasi, kata “kolaborasi” mulai digunakan. Organisasi pada saat itu menjadi semakin kompleks. Saat Anda membuat struktur organisasi, departemen dibuat untuk membagi tugas karyawan dalam organisasi. Kompleksitas organisasi adalah titik awal seringkali kolaborasi antar organisasi yang berbeda (Wanna, 2008). Secara filosofis, kolaborasi merupakan upaya berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Schrage, kolaborasi merupakan upaya menyatukan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi memerlukan beragam aktor, baik individu maupun organisasi, untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama (Harley, 2010).

Paradigma Governance merupakan paradikma baru yang banyak digunakan dan menjadi populer di beberapa negara di dunia. Istilah ini *governance* menjadi lebih populer ketika Bank Dunia kembali memperkenalkan istilah ‘*governance*’ dalam Laporan Bank Dunia dalam tahun 1989. Penggunaan istilah *governance* oleh Bank Dunia mengisyaratkan pendekatan baru untuk pembangunan yang didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa aturan hukum yang paling minimum dan demokrasi (Subhan, 2019). Pada masa demokrasi ini juga menuntut pemerintah makin terbuka dan makin inklusif dalam memberikan ruang bagi Civil Society Organizations dan sektor swasta untuk dapat terlibat dalam implementasi suatu kebijakan (Purwanto, 2015).

Tata kelola, yang diterjemahkan sebagai administrasi publik, adalah penggunaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan

nasional di semua tingkatan. Tata kelola mencakup seluruh mekanisme, proses dan institusi yang digunakan oleh warga negara dan kelompok masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan mereka dalam melaksanakan hak-hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka dan mendamaikan perbedaan-perbedaan mereka (Dwiyanto., 2013). Lebih lanjut, karena pengertian governance dalam konteks pembangunan adalah suatu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan, maka good governance sendiri merupakan suatu hal yang penting.

Berkat upaya penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kulon Progo, telah terbentuk beberapa desa dan kelurahan menjadi desa tahan bencana. Komunitas pemuda dan kelompok relawan di bawah arahan koordinator tuan tanah terdaftar di BPBD Kulon Progo sebagai pasukan komando jika terjadi bencana, membantu mencari donatur, menjaga ketertiban umum, dan mendirikan posko. BPBD Kulon Progo memperhatikan hal tersebut dengan menjalin komunikasi melalui grup WhatsApp dan Facebook, memastikan setiap masyarakat selalu terlibat dalam pencarian informasi dan menjalin kerja sama dengan karang taruna Kulon Progo. Kami akan bekerja sama dalam pencegahan bencana selama keadaan darurat dan setelah bencana. Partisipasi pemuda dalam pencegahan bencana di wilayah Kulon Progo merupakan isu penting yang tidak bisa diabaikan. TRC BPBD Kulon Progo ingin generasi muda berperan sebagai agen penyadaran dalam kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Peran pemuda Kulon Progo dalam mendukung penanggulangan bencana dengan melakukan survei kerentanan, memahami risiko ancaman dan melaksanakan PRB (Disaster Risk Reduction) dengan melaksanakan tanggap darurat desa. (Ayuningtyas, 2022).

Kolaborasi antara BPBD dan FPRB dalam penanggulangan tanah longsor di Kulon Progo dapat mencakup pemetaan risiko, pengembangan strategi evakuasi, dan

pelatihan masyarakat terkait penanggulangan bencana. BPBD dapat memberikan pengetahuan dan sumber daya, sementara FPRB, sebagai forum komunitas, dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dan memperkuat koordinasi lokal. Dengan demikian, kolaborasi ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi bahaya tanah longsor. Kolaborasi antara BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam penanggulangan tanah longsor di Kulon Progo dapat melibatkan pertukaran informasi, sumber daya, dan keterlibatan aktif masyarakat. BPBD dapat menyediakan data bencana dan akses ke sumber daya pemerintah, sedangkan LSM dapat membantu dalam mobilisasi relawan, pendanaan, dan implementasi program-program mitigasi risiko. Kerjasama ini memungkinkan adanya pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil, meningkatkan efisiensi dalam penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana. Selain itu, LSM dapat berperan sebagai suara masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi lokal dalam upaya penanggulangan tanah longsor (Sari, 2021).

Dalam penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja tetapi harus dengan *collaborative governance* karena penanggulangan bencana menjadi urusan semua pihak maka *collaborative governance* penting untuk diteliti. *Collaborative governance* merupakan kerjasama antar pihak yang memiliki tujuan bersama. *Collaborative governance* sebagai sebuah jalan dari tata kelola pemerintah yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non pemerintah dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset public, sehingga dalam penanggulangan tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo ini berjalan

dengan lancar. Pada akhirnya *Collaborative* ini lah yang menjadi kunci keberhasilan dalam penanggulangan tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian terkait *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana sudah banyak di teliti. Namun dalam penelitian ini terkait penanggulangan tanah longsor di Kulon Progo masih terbatas atau belum banyak yang melakukan penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah peneliti lihat, bahwa memiliki banyak perbedaan dan juga ada persamaannya. Persamaan dalam studi literatur review dengan penelitian peneliti yaitu, antara lain : semua penelitian terdahulu yang peneliti lihat membahas *collaborative governance*, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan beberapa menggunakan pendekatan deskriptif. Kemudian perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini memfokuskan proses *Collaborative Governance* dalam penanggulangan tanah longsor di Kulon Progo.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas dan penelitian terdahulu maka peneliti mendorong untuk melakukan penelitian terkait dengan proses *Collaborative Governance*. Pada penelitian ini dapat di lihat permasalahan yang muncul dengan adanya tanah longsor pada beberapa waktu terakhir ini dan meningkatnya yang menyebabkan bencana tanah longsor terjadi dimana-mana. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana para pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan Tanah Longsor.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan secara tepat, peneliti harus menentukan permasalahan, sehingga dapat di pahami darimana akan memulai penelitian ini. Perumusan masalah di butuhkan agar mempermudah penjelasan data dan fakta secara mendalam. Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dengan

Bagaimana *Collaborative Governance* dalam penanggulangan Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan menganalisis *collaborative governance* dalam penanggulangan Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat untuk referensi peneliti selanjutnya serta menjadi acuan dari berbagai pihak. Terdapat berbagai manfaat dari penelitian tersebut yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

a). Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di hasilkan dari penelitian ini yaitu pembaca akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang penanggulangan bencana Tanah Longsor di Kabupaten kulon Progo dengan kolaborasi pemerintah dan berbagai pihak serta membuka wawasan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya di lakukan oleh pemerintah tetapi juga di lakukan oleh Stakeholder.

b). Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah khususnya BPBD Kulon Progo dalam menentukan arah kebijakan kolaborasi dalam penanggulangan tanah longsor.
2. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan tanah longsor di Kulon Progo.

3. Bagi peneliti, penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kolaborasi penanggulangan tanah longsor di Kulon Progo.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis | Judul | Hasil Temuan |
|----|----------------------------|--|--|
| 1. | (Fatiatun et al., 2019) | Analisis Bencana Tanah Longsor Serta Mitigasinya | Menurut hasil penelitian ini mitigasi bencana yang dilakukan untuk mengatasi bencana tanah longsor ini yaitu dengan melakukan mitigasi, non- struktural dan meminimalisasi resiko bencana. Reboisasi dengan menggunakan tanaman/pohon yang lebih bisa menyerap air dan menahan tanah dari longsor juga dilakukan untuk mitigasi bencana tanah longsor longsor ini. Mitigasi lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga masyarakat dan anak- anak korban bencana ini. Untuk anak-anak, penyembuhan trauma itu sangat penting karena akan mempengaruhi kepribadiannya di masa depan. |
| 2. | (Eka Saputra et al., 2016) | Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleg | Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Sukasada tergolong sedang sampai tinggi. Daerah dengan tingkat risiko sedang seluas 2.032 hektar dan tingkat risiko tinggi seluas 7171 hektar. 4.2. |
| 3. | (Rahman, 2015) | Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Banjarnegara | Hasil analisi dalam penelitian ini menyebutkan Mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dilakukan secara struktural maupun non struktural. Mitigasi structural dilakukan dengan penyusunan data base daerah potensi bahaya dan pemasangan Early Warning System (EWS). Mitigasi non struktural |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| | | | dilakukan dengan pemberian informasi, sosialisasi serta pelatihan dan simulasi bencana. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektifitas mitigasi bencana adalah dengan pembentukan masyarakat tangguh serta desa tangguh bencana. |
| 4. | (Setiawan et al., 2021) | <i>Collaborative Governance</i> dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara | Desain kelembagaan dinilai masih kurang optimal karena berkaitan dengan proses pembuatan Destana. Kalaupun sudah berjalan, masih ada nota kesepahaman. Artinya kerjasama ini masih terdapat kendala pada legalitas program dan beberapa kendala kerjasama dengan lembaga negara dan swasta. |
| 5. | (Pratama & Achmad, 2020) | <i>Collaborative Governance</i> Dan Social Capital: Peran Pemerintah dan Non-Pemerintah Dalam Disaster Management di Daerah Istimewa Yogyakarta | Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keenam indikator modal sosial telah dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah tentang grup dan jaringan. Indikator ini menunjukkan terbentuknya kelompok pemuda yang terdiri dari pemuda desa terdampak yang sadar akan bahaya Merapi. Ada beberapa desa, seperti Kepulharjo dan Turgo, tempat generasi mudanya mengorganisir upaya bantuan saat terjadi bencana. Pengorganisasian peran pemuda dalam pengurangan risiko bencana di Desa Kepharjo dan Turgo diposisikan sebagai bentuk kerjasama antara tokoh pemuda itu sendiri atau organisasi kepemudaan, komunitas yang didukungnya, dunia usaha/swasta, dan pemerintah, dengan tujuan utama. adalah sebagai berikut. Komunitas yang membangun sistem yang berketahanan dan aman dari ancaman dan bencana. |
| 6. | (Widyaningsih, 2021) | Manajemen Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Banjarnegara | Meskipun secara keseluruhan pengelolaan bersama di Kabupaten Banjar Negara belum sepenuhnya efektif dan efisien, namun dapat dikatakan sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari hal-hal berikut: Tahap rekonstruksi tahap |

| | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| | | | <p>pembangunan belum efisien dan efektif; b) penanggulangan bencana yang dilaksanakan dinilai belum optimal; c) masyarakat yang terkena dampak bencana dapat kembali beraktivitas secara normal. Namun implementasinya tidak seefektif dan seefisien yang diharapkan, dan masyarakat secara keseluruhan belum sepenuhnya puas. Tahap tanggap berjalan lancar, tahap pemulihan berjalan lancar, dan tahap pembangunan berjalan lancar, namun banyak proyek yang masih belum selesai karena kendala pembebasan lahan oleh warga. BPBD dapat berkolaborasi dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kerakyatan, dan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yaitu meminimalkan jumlah korban jiwa dan risiko dampak bencana.</p> |
| 7. | (Asmaddin et al., 2022) | Kolaborasi Triple Helix Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Buton | <p>Minimnya koordinasi yang terjalin pada elemen triple helix membuat integrasi tidak dapat dibangun sehingga membuat upaya mitigasi terkesan lamban dan ditambah lagi dengan minimnya inovasi mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Bouton. Selain itu, hubungan Triple Helix tidak bisa berkembang sesuai keinginan, karena unsur-unsur Triple Helix mempunyai ideologi berbeda yang mungkin ditekankan oleh masing-masing unsur Helix. Perguruan tinggi dan dunia usaha enggan bekerja sama dengan pemerintah untuk membendung longsor di Kabupaten Buton karena sulitnya persyaratan birokrasi.</p> |
| 8. | (Masyhuri et al., 2021) | Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang | <p>Dalam Penelitian ini bahwa kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang telah melalui berbagai tahapan kerjasama, mulai dari kondisi awal dan diakhiri dengan diperolehnya hasil awal dari proses</p> |

| | | | |
|-----|------------------|---|---|
| | | | kerjasama tersebut. Hasil dari proses kerjasama penanganan longsor yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dan minimnya atau aktifnya partisipasi pemangku kepentingan lain di luar sektor pemerintah sehingga menghambat proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang. |
| 9. | (Dadang, n.d.) | <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan | Penelitian ini membuktikan bahwa ada aspek-aspek prioritas yang khas dalam penanganan banjir di Medan. Aspek-aspek prioritas tersebut kemudian perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan <i>collaborative governance</i> dalam berbagai bentuk kerja sama dengan berbagai aktor. Namun demikian, harus diakui bahwa tidak ada satu kebijakan pun yang bisa memfasilitasi pemecahan masalah banjir secara sempurna. Bahkan Ishiwatari (2019) pun mengakui, tidak ada model yang one-fit-all untuk manajemen penanganan banjir, sekalipun hal itu dilaksanakan oleh negara semaju Jepang. Hanya saja, risiko-risiko kerugian yang mungkin ditimbulkan masih bisa diminimalisir melalui <i>collaborative governance</i> yang memadai. |
| 10. | (Agustina, 2018) | Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Fprb) Diy Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta | Dari analisis data dan paparan terkait kolaborasi Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah DIY dan Forum PRB DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kolaborasi yang terjadi antara Aparatur Birokrasi pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY terjalin dengan baik dalam tahap pra bencana hal ini dikarenakan peran Forum PRB sangat banyak dalam tahapan pra bencana baik dari segi dimensi sistem konteks yaitu |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | sumber daya, kebijakan, pelajaran di masa lalu, dinamika politik, jaringan, dan tingkat konflik serta faktor pendorong yang baik dalam tahapan pra bencana. |
|--|--|--|---|

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas terdapat 10 literature jurnal yang terdahulu dengan berkaitan penelitian yang berjudul *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kulon Progo. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini memfokuskan proses *Collaborative Governance* dalam penanggulangan tanah longsor di Kulon Progo. Sedangkan beberapa jurnal di atas hanya membahas mengenai proses penanggulangan bencana. Berbeda dengan studi terdahulu lainnya, bahwa penelitian ini akan lebih membahas mengenai bagaimana *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kulon Progo. Sehingga penelitian ini lebih menyentuh ke strategi pemerintah daerah dengan Lembaga lainnya dalam bekerja sama menanggulangi tanah longsor di Kulon Progo. Maka dari itu penelitian ini bisa menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya mengenai *Collaborative Governance*.

F. Kerangka Teori

1. Collaborative Governance

Pengertian Collaborative Governance

Collaborative governance adalah jenis “*Governance*” yang mendorong upaya bersa dari pemangku kepentingan dan non state untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui Sembilan pengambilan keputusan kolektif dalam mengatasi sebuah masalah yang kompleks secara efektif. Sehingga *collaborative governance* mendorong pemecahan masalah secara kolektif dengan melibatkan pemangku kepentingan utama dan alternatif bagi manajemen top-down, pembuat

kebijakan dan implementasi (Agustina, 2018). Definisi ini menyoroti bagaimana para pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda, kekuatan, dan kelemahan, terlibat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dengan bekerja secara kolektif tidak tanpa potensi konflik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulaksono, mengatakan bahwa *Collaborative Governance* manajemen yang menghargai keragaman nilai, tradisi dan budaya organisasi, kerja dalam struktur yang relative longgar dan berbasis pada jaringan, dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan tujuan bersama serta memiliki kapasitas mengelola konflik (Sulaksono, T., Suswanta, & Efendi, 2017).

Dalam tulisan ini menggunakan teori Ansell and Gash yang mana *Collaborative Governance* digunakan sebagai dasar pijakan dimana teori tersebut menyebutkan bahwa “a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non – state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets” (Ansell & Gash, 2008). Dengan artian *Collaborative Governance* adalah model pengendalian dimana satu atau beberapa lembaga publik melibatkan para stakeholders non State atau para pemangku kepentingan diluar lembaga publik dalam proses pengambilan kebijakan kolektif yang bersifat formal, konsensus dan deliberatif dengan tujuan untuk membuat serta menerapkan kebijakan publik dan mengelola program publik (Ansell & Gash, 2008).

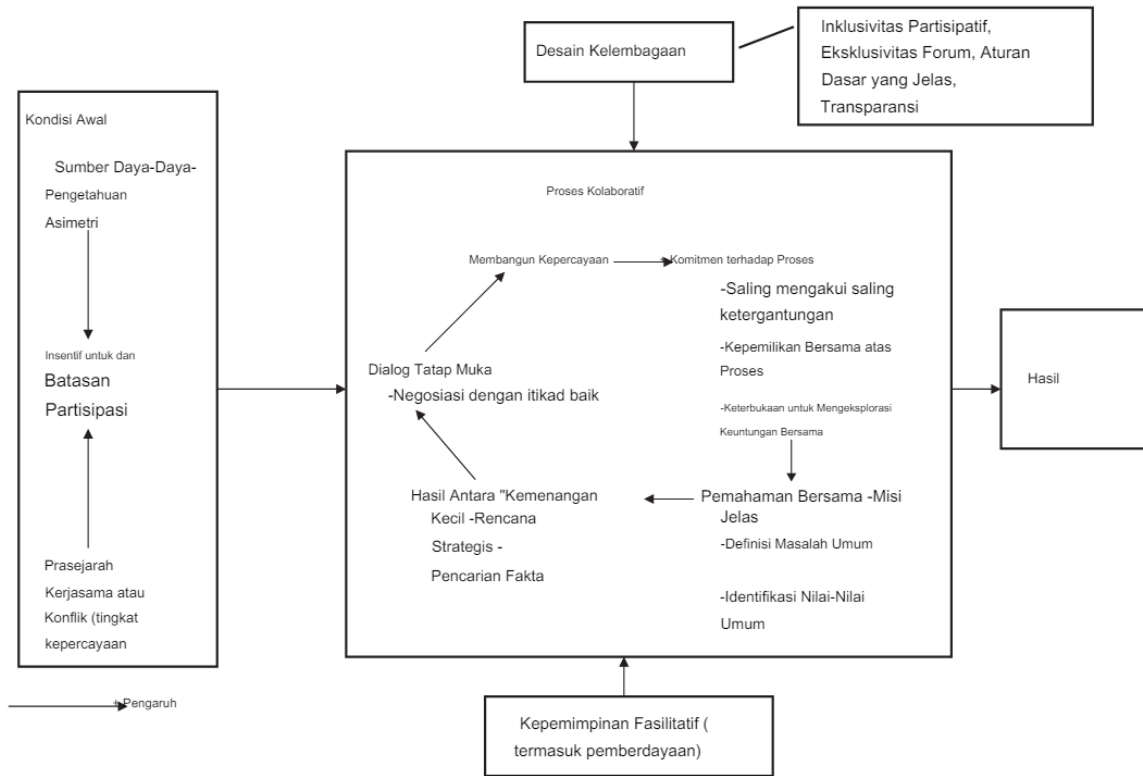
Model *Collaborative Governance*

Tata kelola kolaboratif dipraktikkan oleh pemerintah pusat dan/atau daerah untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui kolaborasi dengan aktor lain yang terlibat dalam proses penyelesaiannya. *Collaborative governance* merupakan suatu

model pemerintahan strategis baru yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam suatu forum dengan pejabat pemerintah untuk bersama-sama mengambil keputusan guna menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Rephrase Tata kelola kolaboratif juga merupakan jenis tata kelola di mana aktor publik dan swasta bekerja sama dengan cara tertentu dan menggunakan proses tertentu untuk membuat undang-undang dan peraturan yang memandu tindakan publik yang tepat (Tilano, 2012).

Dalam *Collaborative Governance*, (Ansell & Gash, 2008) menyebutkan bahwa Collaborative Governance memiliki 4 (empat) Model yang menjadi rujukan. Dalam *Collaborative Governance*, (Ansell & Gash, 2008) menyebutkan bahwa Collaborative Governance memiliki 4 (empat) Model yang menjadi rujukan. Pada gambar dibawah memberikan representasi visual dari temuan utama . Model ini memiliki empat variabel besar mulai dari kondisi, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan kolaboratif.

Gambar 1. 2 Model Tata Kelola Kolaborasi



Sumber: Teori (Ansell & Gash, 2008)

Proses masing-masing variabel luas ini dapat dipilah menjadi variabel yang lebih terperinci. Variabel proses kolaboratif diperlakukan sebagai inti model kami, dengan kondisi awal, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan direpresentasikan sebagai kontribusi penting atau konteks untuk proses kolaboratif. Kondisi awal menetapkan tingkat dasar kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi sumber daya atau liabilitas selama kolaborasi. Desain kelembagaan menetapkan aturan-aturan dasar yang mendasari terjadinya kolaborasi. Kemudian kepemimpinan memberikan mediasi dan fasilitasi penting untuk proses kolaboratif. Proses kolaboratif itu sendiri sangat berulang dan non linier, dan oleh karena itu direpresentasikannya (dengan banyak penyederhanaan) sebagai sebuah siklus.

1. Kondisi Awal

Dalam tahapan ini kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat menyebabkan hal tersebut memfasilitasi atau menghalangi kerja sama antar pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. Bayangkan dua titik awal yang sangat berbeda. Di satu sisi, para pemangku kepentingan mempunyai sejarah perpecahan yang sengit mengenai beberapa isu lokal yang bermuatan emosional dan telah mempertimbangkan masing-masing isu tersebut orang lain sebagai musuh yang tidak bermoral. Di sisi lain, para pemangku kepentingan mempunyai visi bersama mengenai hal apa mereka ingin mencapainya melalui kolaborasi dan sejarah kerja sama masa lalu dan saling menghormati.

Dalam hal ini pada kondisi awal ini di bagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a) ketidakseimbangan antara sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda
- b) Insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi.
- c) Riwayat konflik atau kerja sama antar pemangku kepentingan di masa lalu.

2. Kepemimpinan Fasilitatif.

Kepemimpinan secara luas dipandang sebagai unsur penting dalam mengajak partai-partai untuk berunding mengarahkan mereka melewati masa-masa sulit dalam proses kolaboratif. Meskipun negosiasi “tanpa bantuan” kadang-kadang bisa dilakukan, banyak literatur yang menemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif penting untuk menyatukan para pemangku kepentingan dan mengajak mereka untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif. Fasilitasi merupakan hal yang paling tidak mengganggu hak

prerogatif manajemen para pemangku kepentingan; peran fasilitator adalah memastikan integritas proses membangun konsensus itu sendiri. Mediasi meningkatkan peran intervensi pihak ketiga dalam rincian substantif negosiasi ketika para pemangku kepentingan tidak efektif menjajaki kemungkinan keuntungan yang saling menguntungkan.

3. Desain Kelembagaan.

Desain kelembagaan di sini mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses keproses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar.

4. Proses Kolaborasi.

Model proses tata kelola kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai pengembangan secara bertahap. Misalnya proses pembangunan konsensus memiliki fase pranegosiasi, fase negosiasi, dan fase implementasi. Dalam proses kolaboratif tiga langkah: (1) penetapan masalah, (2) penetapan arah, dan (3) pelaksanaan, dan mengidentifikasi proses tiga langkah yang mencakup persiapan, pengembangan kebijakan, dan pengambilan keputusan, dengan masing-masing langkah yang memiliki beberapa tahap. Model kolaborasi panggung penting untuk menarik perhatian terhadap perubahan strategi kolaborasi seiring dengan perubahan konteks.

Kondisi awal tata kelola kolaboratif sebenarnya menentukan dasar kepercayaan, permasalahan/konflik, dan tingkat modal sosial yang dapat menjadi peluang dan tantangan bagi tata kelola kolaboratif. Desain kelembagaan adalah prinsip dasar tindakan kolaboratif, dan kepemimpinan adalah mediator dan moderator tata kelola kolaboratif. Di sisi lain, proses kolaboratif merupakan inti dari tata kelola kolaboratif,

dan proses kolaboratif bertujuan untuk berinteraksi secara langsung, membangun kepercayaan, membangun komitmen, dan berbagi pemahaman dan hasil (Ansell & Gash, 2008).

Dari paparan tentang konsep kolaboratif governance tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kolaboratif governance secara konseptual dapat diwujudkan secara bersama-sama, partisipasi dari seluruh stakeholder, terjadinya jaringan yang luas diantara para pelaku stakeholder, dan menghasilkan kemitraan yang berlangsung secara terus menerus dalam waktu jangka panjang.

2. Bencana

Pengertian Bencana

Bencana adalah suatu gangguan ekstrim fungsi dari suatu masyarakat yang menyebabkan kerugian sosial, material, dan lingkungan yang meluas dan melebihi kemampuan sumber daya sendiri. Kejadian kejadian seperti gempa bumi, banjir, atau angin topan itu akan menjadi bencana Ketika berakibat serius atau memengaruhi kehidupan manusia, mata pencaharian dan harta benda. Suatu peristiwa bahaya yang menjadi bencana Ketika ada yang cedera, kehilangan nyawa dan mata pencaharian, serta kerusakan infrastruktur dan property umum (Ulum, 2014).

Bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia karena faktor alam dan/atau faktor tidak wajar serta faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa dan lingkungan hidup, hilangnya harta benda, dan dampak psikologis. (Ramli, 2010).

Bencana adalah potensi peristiwa atau kejadian yang menimbulkan ancaman terhadap kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan masyarakat atau terhadap fungsi perekonomian masyarakat atau entitas pemerintah yang lebih luas (Fitriadi et al., 2017).

Jenis-jenis Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana membagi bencana dalam tiga jenis yaitu :

- a) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- b) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- c) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Dalam hal ini potensi bencana yang ada di Kabupaten Kulon Progo memiliki berbagai bencana seperti Gempa Bumi, Tsunami, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Namun tetapi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Kulon Progo adalah bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan fenomena alam yang membantu tercapainya stabilitas di kawasan. Seperti halnya banjir, tanah longsor sebenarnya merupakan bencana alam yang kejadiannya dapat diprediksi karena berkaitan dengan curah hujan (Ramli, 2010). Menurut (ESDM, 2005) Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng.

Jenis-jenis Tanah Longsor

Menurut Kementrian ESDM (ESDM, 2005) Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng.

1. Longsoran translasi adalah ber-geraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai.
2. Longsoran Berputar Longsoran berputar adalah pergerakan massa tanah atau batuan pada longsoran cekung.
3. Pergerakan Balok Pergerakan balok adalah gerak suatu batuan yang bergerak pada bidang luncur datar. Longsoran ini disebut juga longsoran terjemahan batu.
4. Runtuhan Batuan Runtuhan batu terjadi bila sejumlah besar batu atau material lain meluncur ke bawah secara jatuh bebas. Hal ini sering terlihat di lereng dan lereng yang curam, terutama di sepanjang pantai. Runtuhan batu dapat menyebabkan kerusakan serius.
5. Longsor Longsor merupakan jenis tanah longsor yang terjadi secara perlahan. Jenis tanah terdiri dari butiran kasar dan halus. Longsor jenis ini jarang diketahui. Longsor jenis ini jika terjadi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan robohnya tiang-tiang listrik, pohon, dan rumah.
6. Aliran Puing Longsor jenis ini terjadi ketika suatu massa tanah yang bergerak dipaksa masuk ke dalam air. Laju aliran tergantung pada gradien, volume dan tekanan air, serta jenis material. Migrasinya terjadi di sepanjang

lembah dan bisa mencapai ratusan meter. Di beberapa tempat bisa mencapai beberapa ribu meter, seperti di daerah aliran sungai sekitar gunung berapi. Aliran tanah ini dapat menimbulkan banyak korban jiwa.

Tanda-tanda Gejala Tanah Longsor

Sebelum terjadi tanah longsor biasanya disertai dengan tanda-tanda awal yang mendahuluinya. Tanda-tanda awal terjadinya tanah longsor menurut (Supriyono, 2014) antara lain sebagai berikut:

1. Muncul retakan pada lereng gunung yang sejajar dengan arah tebing setelah hujan.
2. Air sungai dan sumur tampak dipermukaan dan berwarna keruh.
3. Di permukaan negara, sumber baru tiba-tiba muncul.
4. Kondisi tebing sangat rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.
5. Di sekitar lereng mulai terlihat pepohonan, tiang-tiang dan rumah-rumah miring.
6. Bentuk rumah berubah sehingga jendela dan pintu sulit dibuka.
7. Terdengar suara gemuruh dari puncak lereng disertai guncangan tanah.
8. Sebagian besar daratan atau batuan telah runtuh.

Faktor-faktor Penyebab Tanah Longsor

Bencana tanah longsor juga memiliki beberapa factor penyebab. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor menurut Kementrian ESDM (ESDM, 2005) yaitu sebagai berikut:

1. Hujan

Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan.

2. Lereng terjal

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar.

3. Tanah yang kurang padat dan tebal

Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas.

4. Batuan yang kurang kuat

Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan

mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal.

5. Jenis tata lahan

Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsor lama.

6. Getaran

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak.

7. Susut muka air Danau atau Bendungan

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya penahan lereng menjadi hilang, dengan sudut kemiringan waduk 220 mudah terjadi longsor dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan.

8. Adanya beban tambahan

Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah.

9. Pengikisan atau Erosi

Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu akibat penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal.

10. Adanya material timbunan pada tebing

Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman, masyarakat kerap menggali tebing dan menimbun lembah.

Tanah timbunan di lembah tersebut belum sepenuhnya dipadatkan seperti lapisan tanah asli di bawahnya. Oleh karena itu, saat hujan, tanah tenggelam sehingga menimbulkan retakan.

11. Bekas longsoran lama

Tanah longsor lama sering terjadi selama dan setelah pengendapan material vulkanik pada lereng yang relatif curam atau selama atau setelah patahan pada kerak bumi.

12. Penggundulan Hutan

Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul dimana pengikatan air tanah sangat kurang.

Tahapan sebelum, Selama dan Sesudah Terjadi Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara berulang atau rutin sehingga sulit untuk dihindari. Bencana tanah longsor telah menunjukkan betapa pentingnya untuk selalu mempersiapkan diri untuk bencana. Kesiapsiagaan tanah longsor adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengantisipasi dan merespon tanah longsor. Sangat penting untuk mempersiapkan diri Anda, keluarga Anda, sekolah Anda, dan komunitas Anda untuk meminimalkan dampak tanah longsor, termasuk kehilangan harta benda dan nyawa (Supriyono, 2014). Tindakan kesiapsiagaan tanah longsor yang dapat dilakukan menurut (Supriyono, 2014) adalah:

1. Sebelum terjadi tanah longsor

- a) Melakukan Pendidikan dan Latihan mitigasi bencana tanah longsor.
- b) Mencatat nomor-nomor telepon penting seperti nomor telepon semua anggota keluarga, rumah sakit, kantor polisi, pemadam kebakaran, dan Lembaga kebencanaan.
- c) Membuat deteksi dini bahaya tanah longsor dengan cara mengamati tingkat curah hujan dan memeriksa stabilitas lereng secara berkala.
- d) Mewaspada tanda dan gejala tanah longsor dan bahaya yang menyertai tanah longsor seperti banjir, aliran material, dan kebakaran.

Terkait dengan tanah longsor, mitigasi adalah upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak tanah longsor. Berikut hal-hal yang bisa dilakukan:

1. Hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman
2. Mengurangi tingkat keterjalannya lereng
3. Terasering dengan sistem drainase yang tepat
4. Penghijauan dengan tanaman berakar dalam
5. Mendirikan bangunan berpondasi kuat
6. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk
7. Relokasi (dalam beberapa kasus)

2. Saat terjadi bencana tanah longsor.

- a) segera menghubungi aparat pemerintah atau petugas yang berwenang untuk melakukan penanggulangan bencana tanah longsor.
- b) segera keluar rumah atau Gedung dan berlindung tempat yang aman.
- c) Jika tidak memungkinkan keluar dari rumah maka lingkarkan tangan dan tubuh seperti bola untuk melindungi kepala agar tidak tertimpa atap

d) Melakukan Tindakan tanggap darurat seperti memberi pertolongan, evakuasi, dan mendengarkan informasi.

3. Setelah terjadi bencana

Setelah bencana tanah longsor terjadi maka tindakan yang seharusnya dilakukan adalah melakukan perbaikan dan pemulihan kehidupan dalam masyarakat. Tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan sesudah terjadi bencana tanah longsor antara lain: memberi bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.

G. Definisi Konseptual

Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan Kolaborasi pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan Bersama. Kerja sama ini untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan Bersama secara efektif. Sehingga *collaborative governance* mendorong pemecahan masalah secara kolektif dengan melibatkan pemangku kepentingan utama dan alternatif bagi manajemen top-down, pembuat kebijakan dan implementasi. Kebijakan ini lah yang nantinya di jadikan model dalam penyelesaian suatu masalah. kerja sama ini juga harus menghargai keragaman nilai, tradisi dan budaya organisasi, kerja dalam struktur yang relative longgar dan berbasis pada jaringan, dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan tujuan bersama serta memiliki kapasitas mengelola konflik.

Dari berbagai teori yang di diskusikan di atas penelitian ini menggunakan teori (Ansell & Gash, 2008). Dalam teori ini menyebutkan bahwa *collaborative governance* memiliki 4 model yang menjadi rujukan yaitu: kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, proses kolaborasi. Maka dapat disimpulkan bahwa

collaboratif governance dapat diwujudkan secara bersama-sama, partisipasi dari seluruh stakeholder, terjadinya jaringan yang luas diantara para pelaku stakeholder, dan menghasilkan kemitraan yang berlangsung secara terus menerus dalam waktu jangka panjang.

Bencana

Bencana merupakan suatu peristiwa yang mana mengakibatkan gangguan dari masyarakat atau alam yang menyebabkan kerugian sosial, material, dan lingkungan luas yang melebihi kemampuan sumber dayanya sendiri. Bencana juga di bedakan menjadi 2 yaitu bencana alam dan bencana nonalam. Bencana alam merupakan bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana nonalam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam di antaranya seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

H. Definisi Operasional

Tabel 1. 3 Definisi Operasional

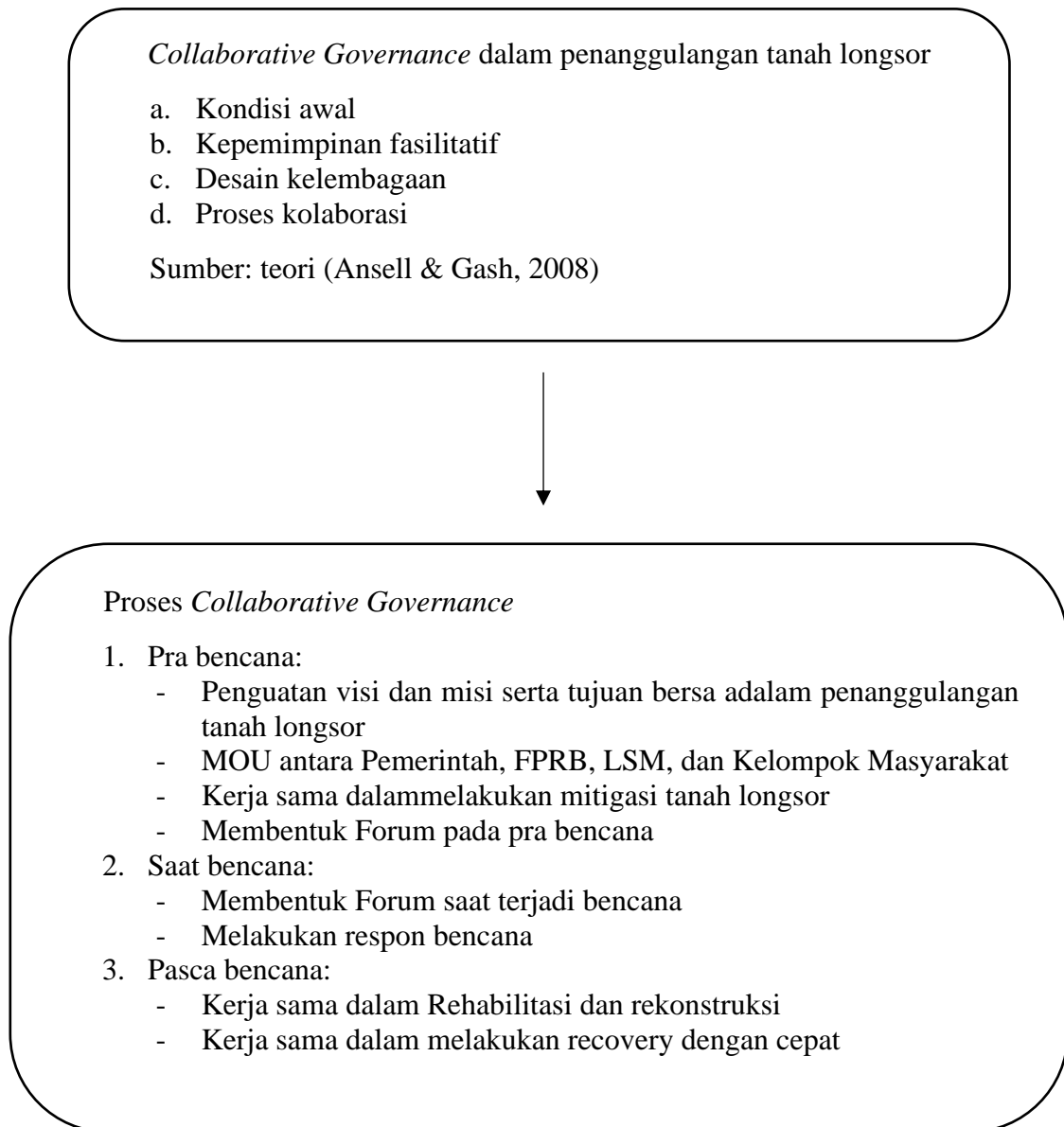
| No | Variabel | Indikator | Parameter |
|----|--------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Kondisi awal | Visi dan misi | <ul style="list-style-type: none"> - Visi kolaborasi dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Renstra BPBD Kulon Progo - Misi kolaborasi dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Renstra BPBD Kulon Progo |
| | | Tujuan bersama | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya draft dokumen kerja sama antara BPBD, FPRB, LSM, dan Masyarakat |
| 2 | Kepemimpinan fasilitatif | Dialog/penyatuan multi pihak | <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Bersama antara BPBD, FPRB, LSM, dan Masyarakat yang memiliki resiko bencana tanah longsor |
| | | Membangun Konsensus | <ul style="list-style-type: none"> - MOU/kesepakatan bersama (formal dan non formal) antara Pemerintah dengan LSM untuk penanggulangan tanah longsor pada pra, saat, dan pasca - MOU/kesepakatan bersama (formal dan non formal) antara pemerintah dengan FPRB dalam penanggulangan tanah longsor pada pra, saat dan pasca |
| 3 | Desain kelembagaan | Bentuk Sinergitas | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya forum untuk mengambil keputusan bersama pada pra, saat, dan pasca |
| 4 | Proses kolaborasi | Penetapan masalah | <ul style="list-style-type: none"> - Pada pra tingginya intensitas kejadian tanah longsor di Kulon Progo - Pada saat bencana tingginya korban tanah longsor - Pada pasca banyaknya bangunan material yang hancur dan hilang |
| | | Penetapan arah | <ul style="list-style-type: none"> - Pada pra pemetaan daerah rawan tanah longsor |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Pada Saat bencana pembagian tugas - Pada Pasca bencana pendistribusian dana |
| | | Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> - Pada Pra bencana membuat dinding penahan tanah longsor - Pada Saat bencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak akibat tanah longsor - Pada Pasca bencana melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan dengan cepat |

Sumber: Diolah dari teori (Ansell & Gash, 2008)

I. Kerangka Berpikir

Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara ilmiah

dengan memfokuskan pada hubungan antara penelitian dan fenomena yang akan diteliti (Herdiansyah, 2010).

Metode penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami atau natural setting (Sulaksono, T., Suswanta, & Efendi, 2017). Metode kualitatif yang akan digunakan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan untuk Masyarakat dan pemerintah dalam memahami *Collaborative Governance* untuk penanggulangan bencana tanah longsor di Kulon Progo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta. Pada proses pencarian data informasi banyak didapatkan dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kulon Progo. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi secara akurat karena peneliti langsung mendapatkan informasi dari sumber-sumber terpercaya. Tidak hanya sekedar informasi seputar kebencanaan pada kabupaten Kulon Progo, tetapi wawancara secara langsung ini juga dilakukan untuk mencari informasi tentang bagaimana *Collaborative Governance* yang dilakukan pemerintah Kulon Progo dalam menanggulangi bencana tanah longsor.

Sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengumpulkan informasi dan menganalisis data yang diperoleh dari beberapa pemangku kepentingan terkait penanganan tanah longsor di kabupaten Kulon Progo. Dengan begitu penelitian ini mencoba untuk mencari data yang autentik atau dari berbagai sumber terkait, seperti: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Forum Pengurangan Risiko Bencana,

Muhammadiyah Disaster Management Center, dan Masyarakat yang terdampak tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo.

3. Jenis Data

a). Data Premier

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber secara langsung dengan beberapa tujuan tertentu seperti dari informan melalui teknik wawancara dan observasi. Sehingga pada penelitian ini, data primer bisa didapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Taruna Siaga Bencana, dan Masyarakat yang terdampak tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo.

b). Data Sekunder

Data sekunder adalah metode atau teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi atau studi literature atau studi terhadulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi literature atau studi terhadulu yaitu seperti Buku, Jurnal, Skripsi, Thesis, Artikel, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan topik yang ada pada penelitian. Data sekunder ini juga berfungsi sebagai pendukung dalam analisa kasus-kasus yang terjadi sehingga dapat memperkuat studi pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mencari, mengumpulkan, dan menghimpun data dari hasil penelitian sebagai pedoman penelitian. Peneliti berusaha mengumpulkan dan mengumpulkan data primer dan sekunder. Mereka melakukan ini dengan melakukan wawancara dan memproses data melalui dokumen langsung tentang subjek penelitian.

a). Wawancara

Komunikasi tentang data yang dikumpulkan selama penelitian dilakukan melalui proses yang dikenal sebagai wawancara. Dalam penelitian kualitatif, wawancara sangat penting karena mereka menggali secara langsung informasi verbal dari sumber yang akurat dan autentik. Metode wawancara juga mengharuskan pewawancara bertindak sebagai pihak yang mencari informasi dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Pranata, 2019).

Pada tahap wawancara ini, peneliti akan mencari informasi dengan melakukan wawancara pada beberapa pihak terkait tentang *Collaborative Governance* dalam penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo. Dari hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk menjawab penelitian ini. Berikut daftar informan dalam penelitian:

Tabel 1. 4 Daftar Informan

| Informan | Jumlah | Alasan |
|---|--------|---|
| Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo | 1 | Mengetahui penanganan pra bencana tanah longsor serta kerja sama dengan berbagai pihak di kulon progo |
| Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo | 1 | Mengetahui penanganan saat bencana tanah longsor serta kerja sama dengan berbagai pihak di kulon progo |
| Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kulon Progo | 1 | Mengetahui penanganan pasca bencana tanah longsor serta kerja sama dengan berbagai pihak di kulon progo |
| Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kulon Progo | 1 | Mengetahui kerja sama yang di lakukan FPRB tingkat kalurahan yang memiliki resiko bencana |
| Ketua MDMC Kulon Progo | 1 | Mengetahui kerja sama MDMC dalam penanggulangan tanah longsor dengan pemerintah |
| Kelompok Masyarakat (Karang taruna, Kelompok tani) | 2 | Mengetahui kerja sama kelompok masyarakat dalam penanggualngan tanah longsor dengan pemerintah |
| Masyarakat yang memiliki resiko bencana tanah longsor | 1 | Mengetahui kerja sama masyarakat dalam penanggulangan tanah longsor dengan pemerintah |

b) Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode pencatatan dokumen selain metode wawancara. Metode pencatatan diperoleh dari pencatatan hasil kejadian. Dokumen biasanya dipahami sebagai catatan tertulis atau gambar-gambar yang berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Karena studi literatur menunjukkan fakta dan data, literatur dapat digunakan sebagai dokumen atau

pedoman penelitian (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk mencari data pada beberapa pihak diantaranya: BPBD Kulon Progo, Forum Pengurangan Resiko Bencana Kulon Progo, MDMC Kulon Progo dan Masyarakat yang terdampak Tanah Longsor di Kulon Progo.

Peneliti menggunakan metode pencatatan dokumen selain metode wawancara. Metode pencatatan diperoleh dari pencatatan hasil kejadian. Dokumen biasanya dipahami sebagai catatan tertulis atau gambar-gambar yang berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Karena studi literatur menunjukkan fakta dan data, literatur dapat digunakan sebagai dokumen atau pedoman penelitian.

c). Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, objektivitas data sebagai alat dengan memberikan subjek kemampuan dalam menyampaikan informasi. Analisis data lebih pada mensintesis hasil-hasil yang diperoleh peneliti pada tahap pengumpulan data agar hasil tersebut nantinya dapat ditransformasikan menjadi informasi penting. Analisis ini akan berbentuk singkat dimana peneliti akan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan yang peneliti ambil di lapangan.

d). Penyajian Data

Menurut Miles dan huberman dalam tulisan (Pranata, 2019) menyebutkan bahwa, penyajian data merupakan tahapan dimana adanya pembatasan suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan suatu tindakan.

f). Penarikan kesimpulan

penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir pada analisis data yang menurut Miles dan huberman pada tulisan (Pranata, 2019), kesimpulan yang telah ditentukan tersebut akan diverifikasi selama penelitian sedang berlangsung. Maka yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu dengan validasi.